



Judul : Revisi UU TNI dan Polri Tak Terbendung, DPR Janji Mengawal
Tanggal : Jumat, 02 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Revisi UU TNI dan Polri Tak Terbendung, DPR Janji Mengawal

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tak terbendung. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berjanji untuk mengawal karena pembahasan revisi kedua UU itu tetap akan dilanjutkan. Terlebih, sejumlah substansi perubahan juga dinilai dapat mengancam demokrasi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan, fraksinya memilih untuk tetap menyetujui pembahasan RUU perubahan atas UU TNI (RUU TNI) dan RUU perubahan atas UU Polri (RUU Polri). Hal ini bukan berarti F-PKS tidak mengindahkan kritik publik yang meluas serta kemungkinan penolakan pembahasan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan diambil karena F-PKS merasa perlu mengawal proses revisi UU TNI dan UU Polri. Sebab, F-PKS menilai substansi kedua RUU tersebut mengandung sejumlah masalah yang bisa mengancam demokrasi.

Ancaman terhadap demokrasi itu salah satunya terlihat pada draf RUU Polri yang memperluas kewenangan polisi, tetapi tidak diimbangi dengan penguatan di bidang pengawasan. Padahal, sebelumnya sejumlah unsur pimpinan DPR mengatakan, fokus perubahan UU tersebut adalah penambahan usia pensiun polisi dan prajurit TNI.

"Kami khawatir, jika menolak berakibat tidak bisa mengawal pembahasan," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak setuju jika UU TNI dan UU Polri direvisi. Pernyataan itu disampaikan saat Megawati menyampaikan pidato kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Gerindra, di Jakarta, Selasa (30/7).

Megawati mengaku heran dengan rencana revisi UU TNI dan UU Polri yang seakan ingin menyelaraskan kedua aparat negara itu. Padahal, ketika dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 periode 2001-2004, justru diupayakan agar ada pemisahan TNI dan Polri dengan dikeluarkannya Ketetapan (Tap) MPR Nomor VI/MPR/2000.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pandangan tersebut harus diikuti oleh seluruh jajaran Fraksi PDI-P di DPR. Sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR pun mengakui itu sebagai instruksi yang harus dilaksanakan. Adapun sebelumnya PDI-P merupakan salah satu fraksi yang turut mendukung revisi UU TNI dan UU Polri.

RUU TNI dan RUU Polri merupakan dua RUU inisiatif DPR yang telah disepakati untuk dibahas bersama dengan pemerintah sejak pertengahan Juli lalu. Meski demikian, pembahasan belum dimulai karena DPR tengah berada dalam masa reses hingga pertengahan Agustus mendatang. Pemerintah pun belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk kedua RUU tersebut.

Krusial dikawal

Mardani mengatakan, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri krusial dikawal karena F-PKS ingin memastikan tujuan revisi kedua UU itu tak keluar dari koridor profesionalitas kedua institusi. Tak hanya itu, pembahasan juga harus melibatkan publik. Sebab, baik TNI maupun Polri merupakan alat negara yang harus dikelola dengan sistem merit yang transparan.

"PKS ingin kalau proses revisi berjalan, maka itu untuk kepentingan institusi TNI dan Polri yang profesional dan mandiri, plus menjadi alat negara," tuturnya.

Senada dengan Mardani, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, mengatakan, fraksinya juga berkomitmen untuk me-

ngawal substansi RUU TNI dan RUU Polri. Hal itu khususnya untuk memastikan tidak ada tugas yang tumpang tindih di antara kedua aparat negara itu. Jangan sampai revisi dua UU itu justru membuat pemisahan tugas TNI dan Polri menjadi tidak jelas.

"TNI itu, kan, tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara, sedangkan polisi menjaga keamanan di masyarakatnya itu," katanya.

Firman tak sepakat dengan kritik publik yang memandang bahwa substansi RUU TNI bakal menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru. Menurut dia, dwifungsi pada Orde Baru terjadi karena TNI memiliki perwakilan di parlemen. Sementara dalam draf RUU TNI justru mengatur soal upaya menempatkan prajurit pada beberapa jabatan publik yang sebelumnya juga sudah kerap terjadi.

"Golkar tentu akan melihat (substansi RUU TNI dan RUU Polri) secara utuh. Kami rasional dan obyektif untuk mendudukkan persoalan. Bukan atas dasar subjektivitas, bukan atas dasar kepentingan," kata Firman.

Sejumlah substansi di RUU TNI dan Polri masih menuai kritik publik. Masyarakat sipil menyoroti ancaman demokrasi karena RUU TNI memuat usulan untuk memperluas jabatan publik yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Aturan tersebut dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang terjadi pada Orde Baru. Tak berhenti di situ, TNI juga sempat mengusulkan agar revisi UU TNI menghapus larangan bagi prajurit untuk berbisnis.

Sementara pada draf RUU Polri, kewenangan polisi bakal diperluas, salah satunya terkait penyadapan. Penambahan kewenangan itu tidak disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap Polri. Oleh karena itu, dikhawatirkan kewenangan yang semakin kuat bisa disalahgunakan untuk menekan kebebasan sipil. (NTA)